



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT DANAREKSA (PERSERO)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : R. MUHAMMAD IRWAN
2. Jabatan : DIREKTUR SDM DAN HUKUM
3. NHK : 643849

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 5.797.037.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 440.650.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m2/181 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.478.715.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 360 m2/60 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 706.020.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.126.602.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/197 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.792.850.000
6. Tanah Seluas 98 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 252.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 2.150.000.000

1. MOTOR, BMW R1200GS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, VESPA CORSA 125 Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, VESPA CORSA 125 Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



5. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. MOBIL, MINI COOPER CLUBMAN Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 995.000.000
7. MOTOR, HARLEY DAVIDSON ULTRA LIMITED Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	4.170.010.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.949.843.821
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.939.014.650
Sub Total	Rp.	17.005.905.471
III. HUTANG	Rp.	1.174.764.446
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	15.831.141.025

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.